



BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

PENGUMUMAN PERPANJANGAN
REQUEST FOR QUOTATION (RFQ) DAN PERMINTAAN PENDAFTARAN CALON PENYEDIA
RENCANA PENGADAAN JASA KONSULTANSI
KAJIAN KELAYAKAN INVESTASI BPKH PADA EKOSISTEM BISNIS HAJI DAN UMROH PASCA PANDEMI
Nomor: B. 16010/BPKH/BP/A7.4/11/2021

Dalam rangka persiapan pemilihan calon penyedia barang/jasa melalui Pengadaan Langsung di lingkungan BPKH, bersama ini kami sampaikan rencana pengadaan, sebagai berikut:

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Kajian Kelayakan Investasi BPKH pada Ekosistem Haji dan Umroh Pasca Pandemi

Ruang Lingkup Pekerjaan Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung jawab menyusun Kajian Kelayakan Investasi BPKH pada Ekosistem Haji dan Umroh Pasca Pandemi dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:

1. **Aspek Makro Ekonomi.** Konsultan akan menyajikan gambaran ekonomi global, ekonomi domestik dan gambaran makro ekonomi secara menyeluruh.
2. **Aspek Pasar dan Industri.** Konsultan akan mengkaji tren dan prospek bisnis pasar terkait dengan industri ekosistem haji dan umroh pasca pandemi, termasuk namun tidak terbatas pada bisnis penyediaan kebutuhan haji dan umroh melalui platform digital .
3. **Aspek Proses Bisnis.** Konsultan akan mengkaji proses bisnis pada ekosistem Haji dan Umroh, termasuk namun tidak terbatas pada bisnis penyediaan kebutuhan haji dan umroh melalui platform digital.
4. **Aspek Hukum.** Konsultan akan menilai segala sesuatu yang berkaitan dengan peraturan-peraturan terkait haji dan umroh baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi, legalitas bisnis, izin usaha terkait, , teknis operasional memperoleh izin dari instansi/dinas/departemen terkait dan seluruh administrasi yang berkaitan dengan aspek hukum dan legalitas.
5. **Aspek Keuangan.** Konsultan akan mengkaji dari sisi keuangan termasuk namun tidak terbatas pada berapa besar modal dan sumber dana yang dibutuhkan dalam Investasi, kapan modal tersebut kembali, Analisa cash flow, proyeksi keuangan dan aspek keuangan lainnya.
6. **Aspek Risiko.** Konsultan akan mengkaji mengenai risiko-risiko apa saja yang mungkin terjadi apabila BPKH melakukan investasi pada ekosistem haji dan umroh,

termasuk pada penyediaan kebutuhan haji dan umroh melalui platform digital.

7. **Kelayakan Investasi BPKH.** Konsultan akan mengkaji kelayakan investasi BPKH pada ekosistem haji dan umroh baik berdasarkan pertimbangan aspek makro ekonomi, industri dan pasar, proses bisnis, hukum, keuangan, dan risiko. Selanjutnya memberikan rekomendasi dan langkah-langkah teknis yang dapat dilakukan BPKH terkait investasi pada ekosistem haji dan umroh pasca pandemi.
8. **Focuss Group Discussion.** Konsultan akan melakukan FGD dengan yang menghadirkan tim ahli dan memaparkan hasil kajiannya pada BPKH dan pihak-pihak yang ditunjuk oleh BPKH

- Kebutuhan Tenaga Ahli/Personil : 3 (tiga) orang Tenaga Ahli/Personil, dengan kualifikasi:
- A. 1 (satu) orang Project Manager dengan kualifikasi:
 - 1) Pendidikan minimal Strata Dua (S2) semua jurusan;
 - 2) Berpengalaman minimal 15 (lima belas) tahun dalam bidang jasa penilaian/konsultansi/studi kelayakan Investasi/Manajemen/Bisnis/Keuangan pada Bisnis Ekosistem Haji Umroh dan/atau sektor usaha lainnya; dan
 - 3) Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan penilaian/konsultansi/studi kelayakan Investasi pada Bisnis Ekosistem Haji Umroh atau Sektor usaha lainnya sebanyak minimal 1x dalam waktu 3 tahun terakhir. (2018-2020).
 - B. 1 (satu) orang Tenaga ahli dengan kualifikasi:
 - 1) Pendidikan minimal Strata Dua (S2) semua jurusan;
 - 2) Berpengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun dalam bidang jasa penilaian/konsultansi/studi kelayakan Investasi pada Bisnis Ekosistem Haji Umroh dan/atau sektor usaha lainnya.
 - C. 1 (satu) orang Tenaga ahli dengan kualifikasi:
 - 1) Pendidikan minimal Strata Satu (S1) semua jurusan;
 - 2) Berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dalam bidang jasa penilaian/konsultansi/studi kelayakan Investasi pada Bisnis Ekosistem Haji Umroh dan/atau sektor usaha lainnya.

Syarat Izin Usaha : Memiliki izin usaha sebagai jasa konsultansi dengan kode KBLI 7020

Waktu Pelaksanaan : 30 (tiga puluh) hari kalender

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

- Keluaran (*Output*) : 1 (satu) Keluaran (*Output*) berupa Kajian Kelayakan Investasi BPKH Pada Ekosistem Haji Dan Umroh Pasca Pandemi
- Perkiraan Maksimal Biaya : Rp185.650.000,- (seratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk semua pajak, bea, retribusi, pungutan lain yang sah, dan out of pocket expenses

Mengingat proses pengadaan akan dilaksanakan melalui aplikasi pengadaan BPKH, maka bagi Para Pelaku Usaha yang kompeten dan berminat mengikuti proses pengadaan ini namun belum terdaftar/belum diaktivasi sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam *Vendor Management System* (VMS) BPKH, **diwajibkan** untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengakses tautan <http://vendor.pengadaan.com/> dan **mengirimkan screen shot halaman isian data Pelaku Usaha yang bersangkutan di portal pengadaan.com** kepada Divisi Pengadaan dan Umum BPKH melalui *email* divisi.pengadaan@bpkh.go.id paling lambat pada hari **Jum'at, 19 November 2021 Pukul 09.00 WIB** dengan *Subject: Pendaftaran Rencana Pengadaan Konsultan Kajian Kelayakan Investasi BPKH pada Ekosistem Haji dan Umroh Pasca Pandemi*.

Khusus bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam VMS BPKH, dapat langsung menyampaikan Perkiraan Harga/Biaya melalui *login* ke Aplikasi Pengadaan (<https://eproc.bpkh.go.id/>) dan mengakses menu: Pengadaan > Survey Pengadaan. Petunjuk pemasukan/input perkiraan harga/biaya dapat dilihat/diunduh pada Aplikasi Pengadaan dengan mengakses : Menu Bantuan > Panduan. Pelaku Usaha yang memiliki pengalaman yang paling sesuai dan menyampaikan perkiraan harga/biaya yang dinilai terbaik, akan dipertimbangkan untuk diundang memasukkan penawaran sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha ini bukan merupakan Dokumen Penawaran dan bukan pengakuan/pengesahan (*endorsement*) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan selain melalui Aplikasi Pengadaan tidak dapat diterima.

Adapun rencana jadwal proses pengadaan, meliputi :

No	TAHAPAN	JADWAL		
		Hari/Tanggal	Waktu	
			Mulai	Akhir*
1.	Pendaftaran Pelaku Usaha	Kamis – Jum'at, 11 – 19 November 2021	Kamis, 11.00 WIB	Jum'at, 09.00 WIB
2.	Verifikasi Data Pelaku Usaha pada portal pengadaan.com			
3.	Pembuktian Kualifikasi untuk menjadi Pelaku Usaha terdaftar pada Aplikasi Pengadaan			
4.	Pengumuman RFQ/RFI (<i>Vendor Survey</i>)	Kamis– Jum'at, 11 – 19 November 2021	Kamis, 11.00 WIB	Jum'at, 12.00 WIB
5.	Penyampaian Perkiraan Harga/Biaya oleh Pelaku Usaha			
6.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran bagi Pelaku Usaha Terpilih	Senin – Rabu, 22 – 24 November 2021	Senin, 08.00 WIB	Rabu, 23.59 WIB

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

No	TAHAPAN	JADWAL		
		Hari/Tanggal	Waktu	
			Mulai	Akhir*
7.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Kamis – Senin, 25 – 29 November 2021	Kamis, 08.00 WIB	Senin, 23.59 WIB
8.	Penandatanganan SPK	Selasa, 30 November 2021	08.00 WIB	17.00 WIB

Keterangan:

*= Bagi Pelaku Usaha yang tidak dapat memenuhi/melengkapi data/dokumen yang dipersyaratkan sesuai batas akhir waktu yang telah ditentukan untuk setiap tahapan, maka tidak akan diproses/diikutsertakan pada tahapan selanjutnya. **Petunjuk singkat dan persyaratan umum pendaftaran dapat dilihat pada Lampiran Pengumuman ini.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 16 November 2021

TTD

Pelaksana Pemilihan pada
Badan Pengelola Keuangan Haji

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Lampiran Pengumuman

Nomor : B. 16010/BPKH/BP/A7.4/11/2021

Tanggal : 16 November 2021

PETUNJUK SINGKAT DAN PERSYARATAN UMUM

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT / CV / Koperasi	KAP/KIPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
DOKUMEN LEGALITAS PERUSAHAAN - WAJIB									
1	Akte Pendirian	- Akte Pendirian		V	V	V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					V		
		- Surat Keputusan Dewan Fakultas - Chamber of Commerce - Business Register						V	V
	Akte Perubahan	Akte Perubahan (atas Pengangkatan Pejabat Komisaris dan Direksi)		V	V				
	SK Kemenkumham (Akte Pendirian)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Pendirian)		V	V	V			
	SK Kemenkumham (Akte Perubahan)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Perubahan)		V	V				
2	Domisili	- Surat Keterangan Domisili (yg dikeluarkan oleh Kelurahan) atau Izin Lokasi/NIB (yg dikeluarkan oleh OSS)		V	V	V			
		- Profile Notaris					V		
		- Keputusan Dewan Fakultas - Chamber of Commerce - Business Register						V	V
3	NPWP Perusahaan	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan		V	V	V	V	V	
4	SPT	Setoran Pajak Tahunan		V	V	V	V	V	
5	SIUP	- Surat Izin Usaha Perdagangan atau Nomor Induk Berusaha (NIB)		V					
		- Surat Keputusan Menteri Keuangan perihal Izin Usaha KAP				V			
		- Kartu ID PERADI				V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					V		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD) - Chamber of Commerce - Business Register – CCI Number						V	V
6	TDP	- Tanda Daftar Perusahaan atau Nomor Induk Berusaha		V	V				
		- Kartu ID PERADI				V			
		- Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN					V		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD) - Chamber of Commerce - Business Register – CCI Number						V	V

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT / CV / Koperasi	KAP/KPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
7	Laporan Neraca dan Laporan Rugi/Laba	- Laporan Neraca 2018/2019 (Auditable / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
		- Laporan Rugi / Laba 2018/2019 (Auditable / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
DOKUMEN PERSONAL - WAJIB									
8	KTP/Passpor/ KITAS Komisaris & Direksi	- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Komisaris		V	V	V			V
		- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Direksi	V	V	V	V	V	V	V
9	NPWP Komisaris & Direksi	Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi Komisaris & Direksi	V	V	V	V	V	V	
10	Ijazah Terakhir Tenaga Ahli	Ijazah Pendidikan Formal terakhir untuk Tenaga Ahli Utama	V	V	V	V	V	V	V
DOKUMEN NON LEGALITAS - WAJIB									
11	Surat Pernyataan Vendor	Surat Pernyataan Vendor (Format Pengadaan.com)	V	V	V	V	V	V	V
12	Kontrak/ Perjanjian/ SPK dr pengalaman perusahaan (4th terakhir)	Surat Perjanjian Kerjasama / PO	V	V	V			V	V
13	Struktur Organisasi	Bagan Struktur Organisasi dalam bentuk Chart		V	V	V	V	V	V
DOKUMEN LEGALITAS - TIDAK WAJIB									
14	Izin Lain-lain	Perizinan seperti IUIK		V	V	V			
15	Surat Keagenan	Perizinan Keagenan atau NIB		V					
16	Angka Pengenal Impor	Angka Pengenal Impor atau NIB		V					
17	Sertifikasi Perusahaan	- Sertifikasi Perusahaan		V		V	V		V
		- Surat Tanda Terdaftar KAP OJK		V	V				
18	Sertifikasi Tenaga Ahli	Sertifikasi Tenaga Ahli	V	V	V	V	V	V	V
19	NIB	Nomor Induk Berusaha		V	V				
20	PKP	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak		V	V	V		V	

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.